

**STRATEGI PENDAMPING PKH DALAM MEWUJUDKAN  
KESETARAAN GENDER DI KECAMATAN SEMANU GUNUNGGKIDUL**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

**Oleh:**

**Alva Agista Rahmawati**  
**NIM 20102050009**

**Pembimbing:**

**Ro'fah, MA., Ph.D**  
**NIP 197211242001122002**

**PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2024**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-865/Un.02/DD/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : STRATEGI PENDAMPING PKH DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DI KECAMATAN SEMANU GUNUNGKIDUL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALYA AGISTA RAHMAWATI  
Nomor Induk Mahasiswa : 20102050009  
Telah diujikan pada : Rabu, 22 Mei 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Ro'fah, MA., Ph.D.  
SIGNED

Valid ID: 665f6b8461c9



Penguji I  
Abidah Muflihati, S.Th.I., M.Si  
SIGNED

Valid ID: 665f6f501b464



Penguji II  
Idan Ramdani, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 665ea5e38824b



Yogyakarta, 22 Mei 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.  
SIGNED

Valid ID: 665f6e9c05d8b7

STATE AM UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281  
Telepon (0274) 589621, Faksimili (0274) 586117  
Website : <http://dakwah.uin-suka.ac.id>

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Tempat

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Alya Agista Rahmawati  
NIM : 20102050009  
Judul Skripsi : PERAN PENDAMPING PKH DALAM MEWUJUDKAN  
KESETARAAN GENDER DI KECAMATAN SEMANU  
GUNUNGKIDUL

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan/Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Mengetahui,  
a.n. Dekan  
Ketua Program Studi  
Ilmu Kesejahteraan Sosial

Siti Solichah, S.Sos. I. M.Si  
NIP 198305192009122002

Yogyakarta, 7 Mei 2024  
Pembimbing

Ro'fah, MA., Ph.D.  
NIP 197211242001122002

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alya Agista Rahmawati

NIM : 20102050009

Prodi : Ilmu Kesejahteraan Sosial

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul **PERAN PENDAMPING PKH DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DI KECAMATAN SEMANU GUNUNGKIDUL** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 07 Mei 2024

Yang menyatakan,



Alya Agista Rahmawati

NIM. 20102050009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERJILBAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta:

Nama : Alya Agista Rahmawati  
NIM : 20102050009  
Prodi : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tidak akan melepas jilbab pada foto Ijazah Sarjana dan Transkrip nilai. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya siap mempertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu saya ucapkan tterimakasih.

Yogyakarta, 07 Mei 2024

Yang menyatakan,

  
METERAI TEMPEL  
FLAKX856391783

Alya Agista Rahmawati

NIM. 20102050009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada kedua orangtuaku,

Ibu Mujiyem dan Bapak Sabar.

Sebagai tanda terimakasih atas dedikasinya dalam membesarkan dan  
mendoakanku setiap harinya.



## MOTTO

*“Dan Hanya Kepada Tuhanmulah Engkau Berharap”*

*(Q.S. Al-Insyirah:8)*

*Work until you don't have to introduce yourself*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Strategi Pendamping PKH dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender di Kecamatan Semanu Gunungkidul”. Besar harapan peneliti agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembacanya.

Skripsi ini dapat selesai semata-mata tidak hanya karena kerja keras peneliti tetapi bantuan pihak lain yang mendukung dan membantunya. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah membantu penelitian ini, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag, M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Siti Solechah S.Sos.I, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Muh. Ulil Absor, S.H.I., MA selaku Dosen Pendamping Akademik (DPA)
5. Ro’fah, MA., Ph.D selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah memberikan waktu, masukan, arahan serta ilmunya dalam penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh staff tata usaha Fakultas Dakwan dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam proses administrasi.
7. Seluruh bapak dan ibu dosen program studi ilmu kesejahteraan sosial yang telah memberikan ilmunya selama masa studi.
8. Pendamping PKH Kecamatan Semanu Gunungkidul, Ibu Mega, Bapak Agung, Ibu Sri, Ibu Anitasari, Bapak Andri dan Bapak Dayat, Bapak Danang, Bapak Herjun.
9. Keluarga dan kedua orang tua peneliti, Ibu Mujiyem, Bapak Sabar, dan Alm. Ibu Ginem, orang tua yang hebat selalu menjadi sandaran terkuat dan tak henti-hentinya mendoakan, dan memberi dukungan moral serta finansial.
10. Keluarga besar Bapak Eko dan Ibu Tini, terima kasih banyak sudah hadir dan memberikan banyak kebaikan kepada peneliti.
11. Teman-teman IKS 2020, terutama kepada Pugus, Tyas, Cindy, dan Ratna. Terimakasih telah memberikan banyak nasihat dan motivasi.
12. Keluarga besar MTs Muhammadiyah Sodo yang telah banyak berkontribusi dan membantu dalam proses penyusunan karya ilmiah ini.
13. Serta seluruh pihak yang telah terlibat dalam penelitian ini baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Peneliti sangat menghargai kritik dan rekomendasi karena peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dalam penyajian materi maupun dalam penulisnya. Peneliti berharap penelitian ini bermanfaat bagi orang-orang yang membacanya.

Yogyakarta, 09 Mei 2024

Yang menyatakan,

Alya Agista Rahmawati  
NIM 20102050009



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Tantangan pembangunan gender di Indonesia masih menjadi persoalan yang kompleks karena budaya patriarki yang masih kuat. Diskriminasi gender banyak terjadi dalam rumah tangga. Pemerintah mengupayakan kebijakan berbasis gender untuk menyamakan hak perempuan dan laki-laki. Salah satu program pemerintah yang memiliki intervensi langsung pada pembagian gender dalam keluarga adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Tujuan program ini selain untuk membantu ekonomi masyarakat tetapi juga melibatkan peran perempuan dalam mitra kerjanya. Pelaksanaan program ini dilakukan bersama pendamping. Peran pendamping sangat penting karena berpengaruh dalam merubah perilaku penerima manfaat melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) mencakup permasalahan gender dalam kehidupan sehari-hari di keluarga yang ada dalam modul *Family Development Session* pendidikan dan pengasuhan anak, pengelolaan ekonomi, dan kesehatan gizi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang sudah dilakukan pendamping PKH dalam mewujudkan kesetaraan gender di Kecamatan Semanu mengingat masih banyaknya masyarakat dengan paham patrilineal yang kuat dan materi gender yang tidak dieksplorasi dalam modul tersendiri. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan 12 informan yang terdiri dari 1 Koordinator PKH Kabupaten, 7 Pendamping PKH, dan 4 penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping memiliki perspektif yang beragam dalam memaknai gender. Pemahaman tentang kesetaraan gender sudah dipahami dengan baik oleh kalangan pendamping. Strategi penyampaian pendamping menggunakan strategi *hidden curriculum* yaitu menyampaikan materi gender dengan menyamarkan kedalam beberapa modul *family development session* seperti modul pengasuhan dan pendidikan anak, pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha, kesehatan gizi, dan perlindungan anak. Selain itu, tantangan yang dihadapi pendamping dalam mewujudkan kesetaraan gender ini yaitu adanya budaya patriarki yang kuat, pengkapasitasan SDM tentang gender belum ada, dan faktor internal pendamping yang belum menikah sehingga merasa kurang fasih apabila memberikan materi pembagian peran kepada pasangan yang sudah menikah.

**Kata Kunci:** Gender, Kesetaraan Gender, Pendamping PKH

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
MOTTO .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>D. Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>10</b>
<b>E. Kerangka Teori.....</b>	<b>14</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>30</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>37</b>
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DAN <i>FAMILY DEVELOPMENT SESSION</i>.....</b>	<b>39</b>
<b>A. Gambaran Umum Program Keluarga Harapan (PKH) Nasional.....</b>	<b>39</b>
<b>B. Gambaran Umum PKH di Kecamatan Semanu Gunungkidul Yogyakarta..</b>	<b>51</b>
<b>C. Informan Penelitian Pendamping PKH Kecamatan Semanu Gunungkidul.</b>	<b>58</b>
<b>BAB III PENDAMPING PKH DAN GENDER: Perspektif, Strategi, dan Tantangan .....</b>	<b>60</b>
<b>A. Perspektif Pendamping PKH tentang Gender .....</b>	<b>61</b>
<b>D. Strategi Pendamping PKH.....</b>	<b>66</b>
<b>E. Tantangan yang Dihadapi Pendamping PKH dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender .....</b>	<b>92</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>98</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>98</b>

<b>B. Saran .....</b>	<b>99</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penerima Manfaat PKH Dibanding Dengan Data Lain di Kabupaten Gunungkidul .....	53
Tabel 2. Data Klasifikasi Pendamping Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Semanu.....	55
Tabel 3. Data Klasifikasi KPM Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Semanu .....	55



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerja sama antara ayah dan ibu dalam pengasuhan.....	69
Gambar 2. Tugas Sederhana Pengasuhan oleh Ayah.....	70
Gambar 3. Diskusi ayah dan ibu tentang pendidikan anak .....	71
Gambar 4. Pengelolaan ekonomi seluruh anggota keluarga .....	75
Gambar 5. Tabel Janji Diri Pencegahan Stunting .....	84
Gambar 6. Contoh kasus penelantaran anak .....	90

## DAFTAR SINGKATAN

PKH : Program Keluarga Harapan

FDS : *Family Development Session*

P2K2 : Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga

KPM : Keluarga Penerima Manfaat



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Isu gender dan kemiskinan di Indonesia masih menjadi persoalan yang kompleks. Keduanya saling berhubungan, rumah tangga menjadi sumber diskriminasi dan ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan. Gender terbentuk dari cara pandang masyarakat yang memandang laki-laki dan perempuan secara feminitas dan maskulinitas. Beberapa kajian mengenai gender membahas tentang pengaruh struktural dan kultural yang mempengaruhi gender dalam masyarakat. Masalah struktural dan kultural ini menjadi tantangan pembangunan gender yang ada di Indonesia sejak dulu. Sistem patriarki sudah menjadi budaya turun temurun yang memposisikan perempuan sebagai kelompok lemah dan rentan akan kemiskinan. Perempuan terperangkap dalam belenggu patriarki dengan ruang gerak yang terbatas. Munculnya pembangunan di beberapa bidang belum menguntungkan perempuan dalam kontrol pemegang keputusan sehingga masih terjadi ketimpangan gender.<sup>1</sup>

Pembangunan berbasis kesetaraan gender memerlukan penguatan yang menyentuh ranah struktural dan kultural. Penguatan ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pandangan, program berbasis gender, dan analisis pemerintah akan kebijakan tentang gender. Secara kultural, budaya patriarki di Indonesia masih nampak sehingga berdampak pada perempuan yang sering diabaikan hak

---

<sup>1</sup> Dina Elina Saragih dan Ari Ganjar, "Perempuan Dalam Pengelolaan Bantuan Program Keluarga Harapan: Perspektif Sosiologi Gender", *Jurnal Sosio Informa*, vol. 8:03 (September-Desember, 2022), hlm. 312.

dan kepentingannya.<sup>2</sup> Upaya Indonesia dalam mewujudkan kesetaraan gender termuat dalam pemenuhan hak perempuan tertera dalam UUD 1945, Inpres No.9 Tahun 2000, dan Peraturan Presiden tentang (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) RPJMN 2020-2024.<sup>3</sup>

Dilansir dari situs resmi DataIndonesia.id ketimpangan gender di Indonesia akhir-akhir ini sedikit membaik. Berdasarkan skor Indeks Kesenjangan Gender Global (GGGI) pada tahun 2022 sebesar 0,697 poin yang menjadikan posisi Indonesia pada peringkat 92 secara global. Indeks tersebut mengalami kenaikan 0,0009 poin dari tahun sebelumnya yang menempati peringkat 101.<sup>4</sup> Kementerian Sosial RI pada tahun 2021 juga mendapatkan penghargaan Kategori Madya yang berhasil melaksanakan Pengarusutaman Gender (PUG). Penghargaan ini diberikan oleh Anugerah Prahita Ekapraya (APE). Sebanyak 13 Kementerian/Lembaga, 29 Provinsi, dan 266 Kabupaten/Kota juga mendapatkan apresiasi.<sup>5</sup>

Sustainable Development Goals (SDGs), 2015-2030 tujuan ke-5 dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia yaitu menjangkau kesetaraan gender dan memberdayakan semua wanita. Visi kesetaraan gender secara tidak

---

<sup>2</sup> Iklilah Muzayyanah Dini, dkk., *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*, (Jakarta: Kemen PPPA, 2020), hlm. 1.

<sup>3</sup> Kementerian Keuangan RI, *Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah Jalan Menuju Kesetaraan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2022).

<sup>4</sup> Sarnita Sadya, "DataIndonesia: WEF: Kesetaraan Gender Indonesia Membaik pada 2022", [WEF: Kesetaraan Gender Indonesia Membaik pada 2022 \(dataindonesia.id\)](https://dataindonesia.id), diakses tanggal 15 Mei 2023.

<sup>5</sup> Data Kemensos RI, "Berhasil Implementasikan Kesetaraan Gender, Kemensos RI Raih Penghargaan APE 2020 Kategori Madya dari Kemen PPPA", <https://kemensos.go.id/berhasil-implementasikan-kesetaraan-gender-kemensos-ri-raih-penghargaan-ape-2020-kategori-madya-dari-kemen-pppa>, diakses tanggal 21 Mei 2023.

langsung terintegrasi dengan tujuan SDGs lainnya seperti memberikan fasilitas pendidikan yang bermutu, menghilangkan kemiskinan, memberikan akses kesehatan, menyediakan air bersih, memperhatikan ekonomi, insdustri dan lingkungan.<sup>6</sup> Dalam upaya ini tidak hanya KemenPPA tetapi Kemensos juga turut andil dalam penanganan masalah gender melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini lahir dari tahun 2007 yang bertujuan dalam mengurangi rumah tangga sangat miskin (RTSM). Program PKH merupakan program *conditional cash transfer (CCT)* atau bantuan tunai bersyarat kepada penerima manfaat.<sup>7</sup> Program Keluarga Harapan (PKH) tidak hanya menjaga *ekonomi shock* keluarga tetapi juga menyinggung peran perempuan dalam ekonomi rumah tangga. Intervensi dalam program ini mengarah pada persoalan kesejahteraan dan kesenjangan gender dalam kehidupan sehari-hari.<sup>8</sup>

Program *CCT* atau Program Keluarga Harapan yang memiliki intervensi langsung pada keluarga memberikan ruang lebih luas terhadap adanya peran pembagian gender yang setara antara istri dan suami. Adanya keterlibatan perempuan dalam Program Keluarga Harapan dianggap akan meningkatkan rumah tangga dan lebih efektif dalam melakukan manajemen keuangan keluarga.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Muzayyanah, dkk., *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*, hlm. 6.

<sup>7</sup> Budi Larasati dan Lina Miftahul Jannah, "Transfer Kebijakan dan Implementasi Program Bantuan Tunai Bersyarat (Conditional Cash Transfer/CCT) di Indonesia", *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 8: 1 (April, 2022), hlm. 72.

<sup>8</sup> Dina Elina Saragih dan Ari Ganjar, "Perempuan Dalam Pengelolaan Bantuan Program Keluarga Harapan: Perspektif Sosiologi Gender", *Jurnal Sosio Informa*, vol. 8:03 (September-Desember, 2022), .

<sup>9</sup> Hasrul Hanif, dkk., *Mewujudkan Program Keluarga Harapan (PKH) yang Lebih Bermakna*, (Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2015), hlm. 11.

Penyebutan penerima dalam PKH adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM). KPM memiliki hak untuk mendapatkan bantuan tunai atau non tunai dan mendapatkan layanan kesejahteraan. Penerima PKH adalah masyarakat yang keadaan rumah tangganya tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Pengeluaran per kapita sebulan mereka di bawah garis kemiskinan sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan pokok.<sup>10</sup>

PKH hadir untuk mendorong KPM dalam menggunakan pelayanan sosial yang diberikan pemerintah sebaik mungkin. KPM dapat mengakses layanan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan, dan kesejahteraan lainnya. PKH termasuk program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan harkat, martabat, pengetahuan, dan kesejahteraan penerima manfaat. Melalui *Family Development Session* (FDS) atau disebut juga Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) KPM akan mendapatkan pengarahan dan bantuan. P2K2 adalah pertemuan rutin yang diikuti oleh keluarga penerima manfaat bersama pendamping. Pemberian edukasi dan motivasi mengenai kesetaraan gender diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tentang pembagian pengasuhan anak antara suami dan istri. Di samping itu pengelolaan ekonomi juga disampaikan khususnya kepada ibu yang mampu dipercaya memmanagement keuangan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Hanifah Fatwa Nadilla dkk., “Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Anak Stunting pada Keluarga Penerima Manfaat”, *Jurnal Pekerjaan Sosial*, vol. 5: 1 (Juli, 2022), hlm. 18.

<sup>11</sup> Fatwa, dkk., “Peran Pendamping”, hlm. 19.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fatwa, pendamping PKH menjadi pemasti keberhasilan kegiatan program di lapangan. Pendamping PKH merupakan tenaga profesional yang ditetapkan Kementerian Sosial untuk mendampingi KPM. Domisili pendamping PKH berada di Kantor Kecamatan sesuai pesertanya. Pendamping PKH bertugas memberikan motivasi, dukungan, pemahaman kepada seluruh KPM agar mereka merasa memiliki tempat untuk mendengarkan keluh kesah mengenai kesejahteraan keluarga KPM termasuk pembagian peran antara suami dan istri dalam rumah tangga.<sup>12</sup>

Dalam konteks kesetaraan gender, pendamping PKH berperan dalam mengubah pola pikir keluarga penerima manfaat dalam meninggalkan budaya patriarki di masyarakat yang sangat kental. Berdasarkan pengalaman pendamping, KPM cenderung memiliki pengetahuan yang minim akan pembagian fungsi suami dan istri dalam keluarga karena disebabkan oleh budaya yang sudah ada sejak dahulu bahwa hanya ibu yang bertugas mengasuh anak dan rumah tangga. Dengan bekal pengetahuan yang disampaikan melalui *pertemuan family development session*, keluarga penerima manfaat diharapkan pelan-pelan mampu memahami makna gender dan mempraktikanya dalam lingkup keluarga agar tidak terjadi ketimpangan gender.<sup>13</sup>

Kabupaten Gunungkidul termasuk wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi se-Yogyakarta dengan jumlah 122,54 ribu penduduk.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>13</sup> Wawancara dengan M, Pendamping PKH Kecamatan Semanu, 1 Desember 2023.

<sup>14</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gunungkidul, "Indikator Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul 2021-2023, [BPS Kab.Gunungkidul](#), diakses pada 10 November 2023.

Rumah tangga pada keluarga miskin akan berdampak pada minimnya akses dalam pengembangan dan pemberdayaan diri. Secara ekonomis, keluarga dengan istri tidak bekerja akan bergantung pada suami dan kurang memiliki kuasa dalam rumah tangga. Berdasarkan fakta di lapangan dan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh Sujarwa dan Lutfi bahwa Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul pada umumnya memiliki paham patrilineal yang kuat. Laki-laki memiliki peran yang lebih dominan. Ibu-ibu di Kecamatan Semanu sebagian besar sibuk mengurus anak, rumah, dan sawah. Sebagian dari mereka juga bekerja di sektor informal dan buruh tani. Aspek keterampilan yang dimiliki oleh ibu-ibu belum dapat digunakan sebagai modal dalam berusaha karena disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya kurang percaya diri, tidak mendapatkan persetujuan dari suami untuk bekerja, dan banyaknya tugas domestik yang diemban sebagai istri. Keputusan dalam rumah tangga secara dominan masih bepegang pada pendapat suami dari pada istri.<sup>15</sup>

Berdasarkan kondisi tersebut adanya program pemerintah yang responsif akan gender melalui pendamping sosial atau pendamping PKH dapat meningkatkan kesetaraan gender khususnya dalam keluarga. Meskipun dalam modul *family development session* belum tercantum secara terang-terangan membahas tentang gender akan tetapi materi yang disajikan menyinggung persoalan peran gender dalam keluarga dengan mencontohkan kerja sama yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. Pendamping PKH di Kecamatan

---

<sup>15</sup> Sujarwa dan Lutfi Wibawa, "Analisis Permasalahan Perempuan dan Potensi Lokal di Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Penelitian Humaniora*, vol. 18: 2 (Oktober 2017), hlm.168.

Semanu sendiri telah melakukan *family development session* bersama KPM dengan jumlah 5.021 dan 18 pendamping yang tersebar di 5 kelurahan yaitu Semanu, Candirejo, Ngeposari, Pacarejo, dan Dadapayu. Untuk meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian perempuan, pendamping PKH Kecamatan Semanu bekerja sama dengan KPM melakukan pemberdayaan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Pendamping Kecamatan Semanu pernah mendapatkan penghargaan atas dedikasi pengabdian sosial dan kemanusiaan dari Kementerian Sosial RI pada tahun 2022 karena memiliki banyak dampingan pemberdayaan. Salah satu pendamping PKH Kecamatan Semanu juga pernah menjadi narasumber *Talkshow* di Kabupaten Ciamis mengenai inspirasi pemberdayaan yang sudah dilakukan bersama KPM dan mendapatkan piagam penghargaan dari Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Ciamis.<sup>16</sup>

Aspek pemberdayaan diatas bertujuan mendayakan perempuan karena sebagian KPM adalah perempuan. Pemberdayaan atau bisnis ini masuk dalam modul perencanaan usaha. Modul *Family Development Session* yang mengarah pada gender banyak ditunjukan melalui pembagian kerja sama pengasuhan suami dan istri. Pendamping PKH akan memberikan waktu *sharing* terkait masalah yang dihadapi dalam keluarga dan bersama-sama mencari tahu solusinya. KPM dapat menyampaikan secara personal kepada pendamping maupun secara umum di pertemuan kelompok atau disebut Pertemuan

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan DP, Pendamping PKH Kecamatan Semanu, 31 Mei 2024.

Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).<sup>17</sup> Pertemuan *family development session* yang dilaksanakan satu bulan sekali ini tentu memiliki kendala karena waktu yang terbatas dan berlangsung singkat.

Melihat urgensitas yang diemban Pendamping PKH, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih jauh mengenai strategi mereka dalam meningkatkan kesetaraan gender di Kecamatan Semanu yang sebagian masyarakatnya berada di pedesaan dan masih mempertahankan budaya patriarki yang kuat. Peneliti membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “STRATEGI PENDAMPING PKH DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DI KECAMATAN SEMANU GUNUNGKIDUL”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti akan merumuskan permasalahan yang akan dijadikan sub bahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif pendamping PKH tentang kesetaraan gender?
2. Bagaimana strategi pendamping PKH dalam mewujudkan kesetaraan gender di Kecamatan Semanu Gunungkidul?
3. Bagaimana tantangan yang harus dihadapi pendamping PKH dalam mewujudkan kesetaraan gender kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Semanu Gunungkidul?

---

<sup>17</sup> Kementerian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021-2024* (Jakarta: Direktorat Jaminan Sosial Keluarga dan Direktorat Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial), hlm. 34.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang diangkat, maka tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui perspektif pendamping PKH tentang kesetaraan gender.
- b. Untuk mendeskripsikan strategi pendamping PKH dalam mewujudkan kesetaraan gender di Kecamatan Semanu Gunungkidul.
- c. Untuk mendeskripsikan tantangan yang harus dihadapi pendamping PKH dalam mewujudkan kesetaraan gender kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Kecamatan Semanu Gunungkidul.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan pada permasalahan yang diteliti, maka hasil penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

- a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan Kesejahteraan Sosial khususnya pendamping PKH dalam mewujudkan kesetaraan gender kepada Keluarga Penerima Manfaat.

## b. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagaimana strategi pendamping PKH, dan para pemerhati PKH dalam mewujudkan kesetaraan gender melalui *skill* dan keahlian praktik yang sudah dilakukan.

## D. Tinjauan Pustaka

Kajian Pustaka adalah menelaah penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik. Studi tentang PKH sudah banyak dilakukan. Aspek kajiannya sudah cukup beragam. Peneliti mengambil tema mengenai “STRATEGI PENDAMPING PKH DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER”. Dengan mengambil tema tersebut peneliti melakukan kajian pustaka dan menemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dan gender. Penelitian tersebut mempunyai hubungan dengan penelitian yang saat ini dilakukan.

Penelitian tentang PKH berbasis kesetaraan gender telah ditemukan dengan tema yang hampir sama. Peneliti memaparkan penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dimuat dalam artikel Anisa Desianti Ramadhani dan Sri Yuliani yang berjudul Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Keluarga Harapan di Kabupaten Klaten (Studi Gender Model Sara Hlupekile Longwe) di dalam jurnal Jurnal Mahasiswa Wacana Publik. Penelitian ini berusaha melihat Program Keluarga Harapan dalam

memberdayakan perempuan belum sepenuhnya berhasil karena faktor budaya patriari dalam kehidupan masyarakat. Namun indikator kesejahteraan, akses, penyadaran, dan partisipasi sudah sedikit nampak.<sup>18</sup>

Kedua, penelitian yang dimuat dalam artikel Dina Elina Saragih dan Ari Ganjar Herdiansah yang berjudul Peran Perempuan dalam Pengelolaan Bantuan Program Keluarga Harapan: Perspektif Sosiologi Gender di dalam Jurnal Sosio Informa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini membahas perubahan struktural pada Program Keluarga Harapan dapat merubah relasi gender dalam keluarga dan perempuan keluar dari perangkap budaya patriarki.<sup>19</sup>

Ketiga, penelitian yang dimuat dalam artikel Erna Ermawati Chotim dan Nur Affifah Al Jannah dengan judul Pengaruh Program Keluarga Harapan terhadap Pemenuhan Kebutuhan Praktis dan Strategis Gender dalam Perspektif Moser yang dimuat dalam Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akutansi. Penelitian ini berusaha melihat posisi perempuan setelah adanya program keluarga harapan masih belum menyentuh kesadaran dan kesempatan dalam aspek ekonomi dan politik.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Anisa Desianti dan Sri Yuliani, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KABUPATEN KLATEN (STUDI GENDER MODEL SARA HLUPEKILE LONGWE), *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, vol. 2: 2 (2022).

<sup>19</sup> Elina, "Perempuan Dalam Pengelolaan".

<sup>20</sup> Erma E. Chotim dan Nur A. Aljannah, Pengaruh Program Keluarga Harapan terhadap Pemenuhan Kebutuhan Praktis dan Strategis Gender dalam Perspektif Moser, *Jurnal Manajemen Ekonomi dan Akutansi*, vol. 5: 1 (Januari-April 2021).

Keempat, artikel Iignes Noverensi berjudul Perempuan dalam Misi Suci Kesejahteraan Sosial: Wujud Dikotomi di dalam Jurnal Kajian Islam Interdisipliner. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan dianggap sebagai kelompok rentan dan siap menjadi objek dalam program keluarga harapan. Konsep perempuan sebagai ibu yang mengurus ranah domestik bukan merupakan *nature* tetapi dari konstruksi sosial atau *nurture*.<sup>21</sup>

Kelima, artikel Togiaratua Nainggolan dengan judul Aspek Gender dalam PKH di dalam Jurnal Sosio Informa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini mengungkapkan bahwa Program Keluarga Harapan belum dapat menjawab persoalan ketimpangan gender tetapi sebaliknya terjadi bias gender dan tidak merubah relasi gender dalam keluarga.<sup>22</sup>

Keenam, skripsi Slivia Nur Alam Sari dengan judul Proses Pemberdayaan Melalui *Family Development Session* (FDS) Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Graduasi Mandiri di Kepanewon Banguntapan Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan materi FDS yang disampaikan

---

<sup>21</sup> Iignes Novirensi, Perempuan dalam “Misi Suci” Kesejahteraan Sosial: Wujud Dikotomi, *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, vol. 3: 1, (Juni 2018), hlm. 14.

<sup>22</sup> Togiaratua Nainggolan, Aspek Gender dalam PKH (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI, 2019) hlm. 7.

melalui sosialisasi, diskusi, dan praktik dapat mendorong KPM untuk melakukan graduasi mandiri yang didasari oleh kemandirian perempuan.<sup>23</sup>

Ketujuh, tesis oleh Wahyu Trisnawati dengan judul *Family Development Session (FDS) di Desa Sidaurip Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini memaparkan strategi yang dilakukan dalam penyampaian FDS menggunakan strategi pembangunan sosial dan menjelaskan bahwa partisipasi KPM sangat aktif.<sup>24</sup>

Kedelapan, skripsi oleh Widad Adearti yang berjudul *Pengaruh Family Development Session (FDS) oleh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Pola Asuh Orang Tua di Kecamatan Lakbok*. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan tentang pola asuh orang tua melalui *family development session (FDS)*.<sup>25</sup>

Kesembilan, skripsi oleh Abdul Jalal dengan judul *Implementasi Family Development Session (FDS) Program Keluarga Harapan di PKH Kecamatan Tugu Kota Semarang (Analisis Bimbingan Konseling Keluarga Islami)*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FDS berdampak dalam meningkatkan pemahaman

---

<sup>23</sup> Slivia Nur Alam Sari, *Proses Pemberdayaan Melalui Family Development Session (FDS) Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Graduasi Mandiri di Kepanewon Banguntapan Kabupaten Bantul*, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan IKS Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2023).

<sup>24</sup> Wahyu Trisnawati, *Family Development Session (FDS) di Desa Sidaurip Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap*, Tesis (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, UNY, 2020).

<sup>25</sup> Widad Adearti, *Pengaruh Family Development Session (FDS) oleh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Pola Asuh Orang Tua di Kecamatan Lakbok*, Skripsi (Bandung: Jurusan Psikologi Fakultas Psikologi, UIN Sunan Gunung Djati, 2022).

keterampilan sehingga KPM dapat mengambil peran dalam keluarga dan masyarakat.<sup>26</sup>

Penelitian diatas merupakan penelitian terhadap Program Keluarga Harapan dengan aspek kajian gender. Penelitian tersebut belum ada yang membahas secara langsung mengenai strategi pendamping PKH dalam mewujudkan kesetaraan gender kepada KPM. Meskipun demikian penelitian terdahulu tersebut dapat dijadikan sebagai referensi.

## **E. Kerangka Teori**

Pada bagian ini akan mengungkapkan perbincangan gender secara teoritis, peran gender, gender dalam program keluarga harapan, pengarusutamaan gender (*gender mainstraiming*), dan strategi *hidden curriculum*.

### **1. Gender**

Gender sebagai wujud yang membedakan antara laki-laki dan perempuan tetapi perbedaan itu didasari oleh sosial dan kultural. Gender berkaitan dengan peran, perilaku, dan sifat yang dianggap pantas bagi laki-laki atau perempuan. Gender berbeda dengan jenis kelamin. Jenis kelamin terbentuk karena faktor biologis dan berkaitan dengan takdir. Perbedaan antara gender dan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Abdul Jalal, *Implementasi Family Development Session Program Keluarga Harapan di PKH Kecamatan Tugu Kota Semarang (Analisis Bimbingan Konseling Keluarga Islami)*, Skripsi (Semarang: Jurusan BPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo, 2019).

- a. Gender : bisa berubah, dapat dipertukarkan, tergantung musim, tergantung budaya masing-masing, bukan kodrat.
- b. Jenis kelamin : tidak bisa diubah, tidak dapat ditukarkan, berlaku sepanjang masa, berlaku dimana saja, dan bersifat kodrat (ciptaan Tuhan).<sup>27</sup>

Gender tidak hanya mengacu pada perempuan namun, kebanyakan dari akademisi atau pemerintah menyamakan gender dengan perempuan. Statement ini dapat muncul karena banyaknya kegiatan dan aktifitas tentang gender yang selalu ditujukan untuk perempuan. Perempuan kalah dalam pengambilan keputusan, posisi politik, dan bahkan posisi keluarga.<sup>28</sup>

Budaya patriarki pasti akan terlibat dalam diskusi ini. Patriarki merupakan sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi. Faktor biologis yang mendasari dominasi laki-laki tidak dapat dipungkiri. Laki-laki memiliki otot, yang membuat mereka dianggap kuat dan tanggung. Namun, pergeseran sosial yang berkembang saat ini mulai berubah. Zaman dahulu jika perempuan keluar rumah sendirian dianggap melanggar nilai dan norma sosial, di zaman sekarang, perempuan dapat pergi sendiri ke sekolah, perkantoran, dan berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi dan politik.<sup>29</sup>

Pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kesejahteraan dinikmati secara adil oleh laki-laki dan perempuan di seluruh

---

<sup>27</sup> Sri Sundari Sasongko, Konsep dan Teori Gender, Pusat Pelatihan Gender dan Peningkatan Kualitas Perempuan, BKKBN (Jakarta: BKKBN Pusat, 2009), hlm. 7.

<sup>28</sup> Siti Azisah dkk, Kontekstualisasi Gender Islam dan Budaya, (Makassar: Seri Kemitraan Universitas Masyarakat UIN Alauddin Makassar, 2016), hlm. 5.

<sup>29</sup> Azisah dkk, "Kontekstualisasi Gender", hlm. 11-12.

dunia, meskipun budaya mengkonstruksi sifat, peran, pembagian kerja, dan ranah gender yang berbeda-beda.<sup>30</sup> Gender di Indonesia dikaitkan dengan hak dan kewajiban yang dijamin oleh UUD 1945, seperti hak perlindungan keamanan, hak hidup, hak pendidikan, hak politik, dan hak ekonomi. Masalah yang masih kompleks di Indonesia yakni kesenjangan gender. Kesenjangan gender dapat disebabkan oleh bias gender atau perlakuan yang tidak sama dalam memberikan kesempatan, berpartisipasi, dan membuat keputusan berdasarkan jenis kelamin dan peran gender.<sup>31</sup> Dalam upaya mengubah perilaku seseorang terhadap pemahaman gender ada beberapa istilah yang perlu diketahui yaitu:

- a. Buta gender (*gender blind*) yaitu kondisi seseorang yang tidak memahami konsep gender sama sekali.
- b. Sadar gender (*gender awareness*) yaitu kondisi seseorang yang menyadari kesamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan.
- c. Peka gender (*gender sensitive*) yaitu kemampuan seseorang melihat aspek gender dalam kebijakan.
- d. Peduli/responsif gender (*gender concern/responsive*) yaitu program atau kegiatan yang sudah dilakukan untuk memperhitungkan kepentingan laki-laki dan perempuan.<sup>32</sup>

Banyak teori yang telah dikembangkan dalam bidang pengetahuan tentang gender sebagai rujukan saat mempelajari masalah gender. Kaum

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>31</sup> Azisah dkk, "Kontekstualisasi Gender", hlm. 11-12.

<sup>32</sup> Sri Sundari Sasongko, Konsep dan Teori Gender, hlm. 9.

perempuan bukan satu-satunya orang yang memperhatikan masalah ketidakadilan dan kesetaraan gender; para ahli seperti Edward Wilson dari Harvard University juga memperhatikan masalah ini. Wilson membagi perjuangan perempuan secara sosiologis sebagai berikut.:

(1) Teori *Nurture*

Teori ini mengatakan bahwa perbedaan antara perempuan dan laki-laki disebabkan oleh konstruksi sosial budaya yang menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Menurut teori ini, perempuan selalu tertinggal dan terabaikan dalam peran mereka dalam kehidupan keluarga, bangsa, dan negara. Teori ini dikenal sebagai kaum feminis dan mendukung kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.<sup>33</sup>

(2) Teori *Nature*

Menurut teori ini, perbedaan antara perempuan dan laki-laki tidak dapat diubah dan ada sejak awal. Kedua jenis kelamin memiliki peran dan tugas yang berbeda, seperti yang ditunjukkan oleh perbedaan biologis ini. Humani, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki perbedaan alami karena fungsinya masing-masing.<sup>34</sup>

(3) Teori *Equilibrium*

Teori ini berpendapat bahwa hubungan antara perempuan dan laki-laki harus seimbang dengan konsep kemitraan dan keharmonisan. Menurut pandangan ini, perempuan dan laki-laki tidak terlibat dalam konflik karena

---

<sup>33</sup> Sundari, "Konsep dan Teori Gender", hlm. 17.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

kedua belah pihak harus bekerja sama untuk mencapai kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan keluarga, masyarakat, dan negara. Akibatnya, kesetaraan gender dan keadilan gender tidak boleh diterapkan secara universal dan bergantung pada perhitungan matematis seperti jumlah atau quota. Sebaliknya, perlu mempertimbangkan masalah situasional dan kontekstual (yang terjadi pada saat tertentu).<sup>35</sup>

## 2. Peran Gender

Peran gender merupakan konsep psikologis dan kultural yang mengacu pada perasaan subjektif seseorang tentang ke-pria-an atau kewanitaan mereka. Peran gender lahir dari adanya perbedaan gender maskulin dan feminim. Sejarah perbedaan gender antara perempuan dan laki-laki disebabkan oleh adanya konstruksi sosial budaya dan anggapan bahwa gender dimaknai sebagai takdir yaitu kodrat sebagai perempuan dan kodrat sebagai laki-laki. Perbedaan gender ini yang kemudian memunculkan peran gender. Peran gender tidak akan menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender sosial memiliki banyak dimensi, beberapa di antaranya kurang menguntungkan laki-laki sementara yang lain kurang menguntungkan perempuan: laki-laki lebih rentan terhadap kekerasan, pemenjaraan, dan cacatan, sementara perempuan lebih cenderung menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual; di beberapa negara perempuan memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah daripada laki-laki. Tindak

---

<sup>35</sup> Sundari, "Konsep dan Teori Gender", hlm. 20.

pidana terhadap perempuan yang mencolok terdiri dari kekerasan, *feticide* (pembunuhan terhadap perempuan), dan *rape* (perkosaan perang).<sup>36</sup>

Ketidakadilan gender yang menjadi permasalahan tersebut bersumber dari isu gender di ranah domestik dan publik. Lingkup kegiatan ini mengkategorikan peran perempuan yang dianggap pantas dan tidak pantas. Peran domestik akrab dengan segala hal yang berkaitan di dalam rumah tangga. Sedangkan peran publik berada pada ranah publik atau identik dengan pekerjaan di luar rumah.<sup>37</sup>

#### a. Peran Domestik

Peran domestik biasanya dikaitkan dengan sifat pada perempuan. Peran domestik mencakup semua pekerjaan perempuan di rumah dan tugas alaminya sebagai seorang perempuan, seperti menjadi ibu yang mengurus anak dan tugas rumah tangga lainnya, seperti membersihkan rumah dan memasak. Hadirnya perempuan dalam ranah domestik seolah sudah menjadi kodrat alamiahnya. Hal ini juga berkaitan dengan sifat alami perempuan sesuai teori *nature* yang membentuk sifat dasar manusia berdasarkan faktor biologis. Peran domestik ini seakan melekat terlebih bagi mereka yang sudah menikah dan memiliki anak.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Open Data, Pengarusutamaan Gender, [https://issuu.com/opendatabdg/docs/profil\\_gender\\_dan\\_anak\\_kota\\_bandung\\_2021/s/17746269](https://issuu.com/opendatabdg/docs/profil_gender_dan_anak_kota_bandung_2021/s/17746269), diakses pada 31 Mei 2024.

<sup>37</sup> Jumatil Huda, Peran Wanita dalam Ranah Domestik dan Publik dalam Pandangan Islam, Tesis (Yogyakarta: Jurusan Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), hlm. 15.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm 16-17.

### b. Peran Publik

Peran publik merupakan kebalikan dari peran domestik. Gambaran peran publik umumnya mendominasi laki-laki. Peran publik berkaitan dengan pekerjaan apa saja asal ruang lingkungannya berada di luar rumah. Peran publik dalam hal pekerjaan yaitu pekerjaan yang produktif dan menghasilkan uang. Peran publik digambarkan pada laki-laki yang bertugas mencari nafkah dalam keluarga. Peran publik ini mencakup beberapa pekerjaan yang banyak interaksi dengan orang lain dan berada di luar seperti pekerjaan di kantor atau tempat-tempat umum seperti mall dan lain-lain.<sup>39</sup>

### c. Peran ganda

Peran ganda adalah dua peran atau lebih yang dijalankan secara bersamaan. Dalam hal ini, termasuk peran seorang perempuan sebagai istri bagi suaminya, ibu bagi anaknya, dan perempuan yang bekerja di luar rumah. Peran ganda akan berakibat pada beban ganda yang dilakukan salah satu pasangan. Salah satu jenis kelamin mengalami beban kerja yang lebih besar daripada jenis kelamin lainnya dikenal sebagai beban ganda. Seringkali, peran reproduksi perempuan dianggap bertingkat dan permanen. Jumlah perempuan yang bekerja di sektor publik telah meningkat, tetapi ini tidak diiringi dengan penurunan tanggung jawab rumah tangga atau pekerjaan dalam rumah. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menggantikan pekerjaan tersebut kepada perempuan lain, seperti pekerja rumah tangga atau anggota keluarga. Dengan demikian,

---

<sup>39</sup> Jumatil Huda, "Peran Wanita dalam Ranah", hlm. 18.

penjelasan ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan di sektor domestik (rumah) dan publik (pekerjaan) menghasilkan peran ganda. Peran ganda dapat mengakibatkan ketidakadilan gender atau bisa menimbulkan kesetaraan. Kesetaraan bisa timbul apabila masing-masing pasangan saling bekerja sama dan membagi pekerjaan tanpa berat sebelah. Namun, apabila hal ini belum dapat dilaksanakan ketidakadilan gender yang akan muncul.<sup>40</sup>

d. Teori Ketidakadilan gender

Dampak ketidakadilan gender yang dikonstruksi oleh sistem sosial sangat merugikan laki-laki dan perempuan. Selama ini, masyarakat umum percaya bahwa kaum perempuan tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga karena mereka memiliki sifat rajin yang cocok apabila mengurus pekerjaan rumah tangga. Adanya kemitraan gender dalam keluarga melalui relasi peran gender adalah bentuk keadilan dalam rumah tangga. Adanya kemitraan laki-laki dan perempuan dalam pembangunan menunjukkan perubahan nilai sosial, dimana bukan satu pihak yang memiliki tanggung jawab pada pekerjaan publik tetapi juga perempuan begitupun sebaliknya dengan pekerjaan domestik. Meningkatnya kemitraan gender dalam menjalankan fungsi keuangan keluarga yang ditunjukkan dengan saling mendukung dalam menghasilkan pendapatan, menunjukkan pergeseran nilai keluarga.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Amanda Clara dan Feni Rosalia, Peran Ganda Perempuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus di Pabrik Karet CV KA 2 Desa Negeri Ulangan Jaya Kab Pesawaran), *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, vol, 10: 3 (2023), hlm. 1237-1239.

<sup>41</sup> Siti Azisah dkk, Kontekstualisasi Gender Islam dan Budaya, hlm. 15.

### 3. Pengarusutamaan Gender (*Gender Mainstreaming*)

Pengarusutamaan Gender (*Gender Mainstreaming*) merupakan strategi yang bertujuan untuk mengintegrasikan masalah gender ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan program proyek dan kegiatan pembangunan nasional di seluruh bidang dan sektor pembangunan. Tujuan *gender mainstreaming* memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama kepada sumber daya pembangunan, keterlibatan yang sama dalam proses pembangunan, termasuk pengambilan keputusan, kekuatan yang sama untuk mengontrol sumber daya pembangunan, dan keuntungan yang sama dari hasil pembangunan.<sup>42</sup>

Salah satu upaya sebagai strategi pembangunan dalam meningkatkan peran perempuan dengan memberikan kesempatan dan akses yang sama melalui berbagai penguatan, salah satunya melalui regulasi kebijakan. Jenis pembangunan yang akan dilakukan sangat dipengaruhi oleh pembagian kerja berdasarkan gender dan bagaimana para perencana melaksanakan pembagian tersebut.<sup>43</sup> Analisis mengenai *gender mainstreaming* dapat dilihat menggunakan perspektif gender model Sara Longwe yang melihat aspek kesejahteraan (*welfare*), akses (*access*), penyadaran (*conscientisation*), partisipasi

---

<sup>42</sup> Landung Esariti, dkk, "Pengarusutamaan Gender dalam Program Gerbang Hebat Sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan di Kota Semarang", *Jurnal Tata Loka*, vol. 21:1 (Februari, 2019), hlm. 143-144.

<sup>43</sup> Muhammad Nur dan Refti Handini, "Pembangunan Berbasis Gender Mainstreaming", *Jurnal Paradigma*, vol. 5:3 (2017), hlm. 3.

(*participations*), dan pengendalian (*control*). Lima indikator ini dapat melihat tingkat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan program atau strategi yang dilakukan

a. Kesejahteraan (*welfare*)

Tingkat kesejahteraan materi perempuan relatif terhadap laki-laki. Pertanyaan penting yang perlu diajukan adalah: apakah perempuan memiliki akses yang sama terhadap sumber daya seperti pasokan makanan, pendapatan dan, perawatan medis dibandingkan laki-laki.<sup>44</sup>

b. Akses (*access*)

Adanya akses yang sama terhadap tanah, tenaga kerja, kredit, pelatihan, fasilitas pemasaran, dan semua layanan serta manfaat publik. Longwe menunjukkan bahwa kesetaraan akses diperoleh dengan menerapkan prinsip kesetaraan kesempatan, yang biasanya memerlukan reformasi hukum dan praktik administrasi untuk menghapus semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan.<sup>45</sup>

c. Penyadaran (*conscientisation*)

Adanya pemahaman bahwa peran gender adalah budaya yang dapat diubah. 'Penyadaran' juga melibatkan keyakinan bahwa pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin harus adil dan disetujui oleh kedua belah pihak, dan

---

3. <sup>44</sup> Ismi Dwi Astuti, "Analisis Gender Model Sara Longwe", Bahan Ajar FISIP UNS, hlm.

<sup>45</sup> *Ibid.*

tidak melibatkan dominasi ekonomi atau politik dari satu jenis kelamin pada jenis kelamin yang lain.<sup>46</sup>

d. Partisipasi (*participations*)

Adanya partisipasi setara antara perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, maupun administrasi. Partisipasi merupakan aspek yang sangat penting dari proyek pembangunan, di mana partisipasi berarti keterlibatan dalam penilaian kebutuhan, perumusan proyek, implementasi, dan evaluasi. Kesetaraan partisipasi berarti melibatkan perempuan dalam membuat keputusan dimana komunitas mereka akan terpengaruh, dalam proporsi yang sesuai dengan proporsi mereka dalam komunitas yang lebih luas.<sup>47</sup>

e. Pengendalian (*control*)

Kendali perempuan atas proses pengambilan keputusan melalui penyadaran dan mobilisasi, hal ini dimaksudkan untuk mencapai kesetaraan kendali atas faktor-faktor produksi dan distribusi manfaat. Kesetaraan kontrol berarti keseimbangan kontrol antara laki-laki dan perempuan, sehingga tidak ada pihak yang mendominasi.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Ismi Dwi Astuti, "Analisis Gender Model Sara Longwe", Bahan Ajar FISIP UNS, hlm.

<sup>48</sup> *Ibid.*

#### 4. Gender dalam Program Keluarga Harapan

Dalam konteks pembangunan, Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan kepercayaannya kepada ibu atau perempuan karena dengan perempuan mendapatkan bantuan baik berupa uang maupun non tunai dapat mengubah dan membantu posisinya dalam keluarga. Perempuan dipercaya dapat memanfaatkan bantuan yang diberikan benar-benar diperuntukan untuk kesejahteraan keluarga bukan untuk yang lain. Perempuan cenderung memikirkan kondisi keluarga dan memperhatikan seluruh anggota keluarganya. Sebelum adanya komponen kesejahteraan, PKH mengangkat indikator kesehatan dan pendidikan. Ibu dipercaya mampu memberikan kesehatan atau gizi kepada anaknya dan memberikan pendidikan yang baik untuk anaknya melalui bantuan yang diterima.<sup>49</sup>

Program keluarga harapan menghadirkan pendamping salah satunya untuk membentuk *human capital* bagi siapapun yang hadir dalam pertemuan kelompok. Penerima yang hadir akan membawa perubahan kepada anggota keluarganya masing-masing. Pengetahuan ini sehingga mengalir mulai dari pendamping kemudian penerima manfaat yang hadir FDS dan sampailah pada seluruh keluarga. Ini menunjukkan adanya *Trickle Down Effect* atau efek menetes ke bawah. Efek yang diberikan oleh program melalui stimulus P2K2 untuk mengubah pola pikir perempuan akan memberikan efek kepada keluarga. Bantuan tunai yang diperuntukan dan dipegang perempuan akan menjadi efek kesejahteraan keluarga. *Trickle Down Effect* membawa perubahan dalam

---

<sup>49</sup> Hanif, dkk., "Mewujudkan Program", hlm. 38.

keluarga melalui sistem hierarkis. Perempuan akan membawa efek kesejahteraan kepada suami dan anak-anaknya.<sup>50</sup>

Peran yang seharusnya dilakukan perempuan sebagai penerima bantuan yaitu dengan:

- a. Ibu memposisikan dirinya sebagai pengurus atau manajer. Ibu dapat mengambil bantuan dana atau non tunai berdasarkan rekening yang sudah ada dan mengatur pemanfaatan dana bantuan PKH. Bantuan benar-benar dipergunakan untuk kebutuhan dan tidak disalahgunakan. Ibu dapat tegas membatasi apabila anggota keluarga lain ingin mendominasi bantuan yang diberikan terlebih menggunakan bantuan untuk kegunaan lain.
- b. Ibu mentransfer ilmu yang diberikan oleh pendamping kepada suami dan anak-anaknya. Ibu membangun komunikasi dengan anggota keluarga menyampaikan ilmu yang telah didapatkan ketika pertemuan atau P2K2 dengan tujuan semua anggota keluarga memiliki prinsip yang sama.<sup>51</sup>

Adapun kritik PKH mengenai sudut pandang gender yaitu adanya peran ganda yang dibebankan pada ibu karena disamping mengurus keuangan PKH juga mengelola rumah tangga. Beban ganda banyak dialami oleh kaum perempuan terutama bagi mereka yang bekerja dan harus mampu *menghandle* seluruh pekerjaan di rumah. Kritik yang kedua yaitu penekanan pada

---

<sup>50</sup> Andrew Parker, dkk, Regulasi dan efek Tetesan ke Bawah (*trickle-down effect*) perempuan dalam peran kepemimpinan, *Jurnal Elsevier*, (2023), hlm. 2.

<sup>51</sup> Akhmad Misbakhul Hasan, dkk., Femisipasi Kemiskinan: Akses dan Kontrol Perempuan pada Program Keluarga Harapan di Masa Covid-19, *Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan*, vol. 23: 1 (April 2023), hlm. 75.

perempuan di dalam PKH menjadi bias gender karena suami tidak dilibatkan dalam program. Kondisi ini menunjukkan adanya efek tidak sengaja karena tujuan PKH dalam meningkatkan posisi perempuan yaitu mengajak mereka untuk berkontribusi aktif dan mampu melakukan perubahan. Perempuan dengan bantuan PKH dapat meningkatkan posisinya di keluarga. Akan tetapi di beberapa kejadian uang PKH yang tidak diketahui oleh suami menjadi suatu konflik karena kurangnya komunikasi.<sup>52</sup>

Kritik mengenai Program Keluarga Harapan yaitu dengan memilih ibu sebagai penerima program, masih lemah dampak dan implementasinya. Apabila tujuan PKH menasar pada kesetaraan perempuan perlu memposisikan ibu sebagai subjek dengan mengkaji pengalamannya, mendengarkan pendapat atau aspirasinya, dan membantu mengidentifikasi kebutuhan serta permasalahan kemudian menuangkan dalam perencanaan yang matang. Perencanaan ini selanjutnya dapat dilaksanakan dalam pola relasi keluarga dan pada tahap akhir mengevaluasi apa yang telah dilakukan untuk dikaji ulang. Pemerintah dalam menyetarakan kaum perempuan dan laki-laki seharusnya lebih menegaskan bahwa semua warga negaranya memiliki hak bekerja yang setara dan tidak membedakan berdasarkan jenis kelamin dengan perlindungan hak yang sama. Baik perempuan atau laki-laki memiliki modal dasar yang sama dan mampu dikembangkan baik modal sosial, ekonomi, budaya, dan simbolik.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Hanif, dkk., "Mewujudkan Program".

<sup>53</sup> Elina, "Perempuan Dalam Pengelolaan", hlm 267.

Konsep Gender dalam pembangunan (kebijakan/program) mengupayakan kesetaraan gender dalam memberikan sarana prasarana atau fasilitas pendidikan yang setara agar terjadi perubahan nilai dengan transfer ilmu dan ketrampilan, pemberian kemandirian ekonomi yang sama, pemberian akses yang sama dalam pengambilan keputusan.<sup>54</sup>

Ketimpangan gender banyak terjadi pada kaum rentan seperti perempuan dan kaum miskin atau kelompok yang memiliki kekuatan yang lemah. Adanya ketidaksetaraan gender akan menghambat kesejahteraan. Program Keluarga Harapan (PKH) melalui kegiatan P2K2 yang dipandu oleh pendamping menggerakkan kesetaraan gender antara suami dan istri dan menegaskan adanya relasi gender. Pemberian uang bantuan yang diberikan kepada ibu sebagai pengurus keluarga dapat mengangkat harkat dan martabat perempuan. PKH percaya bahwa perempuan memiliki komitmen yang besar pada kesejahteraan keluarga. Dengan demikian program ini dapat memberdayakan perempuan dan menciptakan citra positif perempuan. Tujuan PKH dalam peningkatan kesejahteraan pada aspek gender adalah bagaimana perubahan perilaku anggota keluarga dalam melakukan keberfungsian sosialnya. Perubahan yang dimaksud adalah menjadikan keluarga yang fungsional dan produktif termasuk dalam relasi gender antara suami dan istri.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Nainggolan, "Aspek Gender", hlm 16.

<sup>55</sup> Desianti, "Pemberdayaan Perempuan", hlm. 399.

## 5. Strategi *Hidden Curriculum*

*Hidden curriculum* merupakan kurikulum yang tersembunyi atau terselubung. Istilah *hidden curriculum* menunjuk kepada segala sesuatu yang dapat berpengaruh didalamnya berlangsungnya pengajaran yang dapat meningkatkan atau mendorong seseorang maupun perilaku sehari-hari. Kurikulum dalam Program Keluarga Harapan merujuk pada modul *family development session* yang apabila dicermati, maka ditemukan beberapa hal yang penting salah satunya masalah gender dalam keluarga. Adanya pembahasan gender dalam *modul family development session* termasuk tipe *hidden curriculum* atau kurikulum yang tersembunyi, tidak dicantumkan, dan tidak ditulis dalam pembahasan modul inti. Kurikulum tersembunyi bertujuan untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang sehingga mereka dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin pada kebijakan atau lingkungan. Adanya perubahan tingkah laku ini memungkinkan untuk berfungsi sempurna ketika di dalam keluarga atau masyarakat.<sup>56</sup>

*Hidden curriculum* juga menunjuk pada interaksi antara pendamping dengan KPM. Pembelajaran modul *family development session* yang secara garis besar membahas peran setara antara suami dan istri secara tidak langsung dipahami oleh KPM meskipun materi gender tidak diprogramkan dalam Program Keluarga Harapan secara lebih jelas. Buku atau modul FDS merupakan modul atau kurikulum berbasis inklusif

---

<sup>56</sup> Nuni Nurajizah, dkk, "Model Hidden Curriculum Untuk Mengembangkan Karakter Disiplin Pada Peserta Didik", *Jurnal Konseling Andi Matappa*, vol. 3:1 (Agustus, 2019), hlm. 24-25

gender karena mengajarkan kepada KPM mengenai akses, partisipasi, kontrol dan aspek non diskriminasi kepada KPM dan pasangan.<sup>57</sup> Adapun hidden curriculum yang ada pada modul family development session adalah 1) Modul pengasuhan dan pendidikan anak, 2) Modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha, 3) Modul kesehatan dan gizi, dan 4) Modul perlindungan anak.<sup>58</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian jenis ini tidak menggunakan statistik atau kuantifikasi, tetapi lebih Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian jenis ini tidak menggunakan statistik atau kuantifikasi, tetapi lebih berfokus pada kisah, kehidupan, perilaku, fungsi organisasi, gerakan, atau hubungan seseorang.<sup>59</sup> Pendekatan yang kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berdasarkan pengumpulan data yang melibatkan subjek penelitian. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan strategi pendamping PKH dalam mewujudkan kesetaraan gender di masyarakat dan menganalisa pandangan masyarakat sendiri akan kesetaraan gender. Penelitian deskriptif menjelaskan data lapangan agar dapat digeneralisasikan dan sampai pada kesimpulan. Penelitian ini mencakup strategi apa yang telah dilakukan pendamping PKH kepada KPM

---

<sup>57</sup> Bani Syarif, Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Fakultas Syariah, Jurnal Equalita, vol. 2:1 (Desember, 2020), hlm 169.

<sup>58</sup> Wawancara dengan DP, Pendamping PKH Kecamatan Semanu, 31 Mei 2024.

<sup>59</sup> Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 41.

dalam ranah gender sesuai dengan *Family Development Session (FDS)* di Kecamatan Semanu Gunungkidul.

## 2. Sumber Data

Sumber data utama penelitian kualitatif berasal dari lapangan dan sumber tertulis serta foto. Data utama dari lapangan adalah kata-kata dan tindakan informan yang di wawancarai. Rekaman *handphone* dan catatan tertulis digunakan untuk menyimpan sumber data utama.

## 3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek merupakan orang atau suatu hal yang menunjukkan informasi akan keadaan tempat penelitian. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik sampling. Penelitian ini menggunakan *non probability* jenis *purposive sampling*. *Purposive sampling* melibatkan pertimbangan dalam penentuan sampel, sedangkan *non-probability* sampling tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama kepada individu yang dipilih sebagai sampel.<sup>60</sup>

Informan penelitian yaitu pendamping PKH dan KPM PKH. Informan pendamping / PKH khusus sebagai pendamping yang sudah memiliki pengalaman pendampingan kurang lebih 5 tahun. Penentuan informan KPM PKH dikhususkan bagi penerima bantuan yang sudah menjadi anggota sejak lama selama 5 tahun terakhir. Informan dalam penelitian ini berjumlah 12 yakni 7 pendamping PKH yaitu A, AA, AS, D, DP, S, M dan 4 KPM yaitu T, Y, J, W KPM PKH Kecamatan Semanu dan 1 Koordinator PKH Kabupaten Gunungkidul yaitu H.

---

<sup>60</sup> Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian*, hlm. 142

Subjek penelitian ini sebagai berikut:

a. Pendamping PKH Kecamatan Semanu Gunungkidul.

Pendamping PKH Kecamatan Semanu Gunungkidul yang sudah memiliki pengalaman pendampingan kurang lebih 5 tahun. Hal ini bertujuan mendapatkan informasi terkait peran yang sudah dilakukan selama melakukan pendampingan kaitanya dengan peningkatan kesetaraan gender yang diberikan kepada KPM.

b. Keluarga Penerima Manfaat PKH

Keluarga Penerima Manfaat, peserta yang sudah menjadi anggota lama sejak 5 tahun terakhir dalam program bantuan PKH dengan maksud mendapat informasi terkait materi *Family Development Session* yang sudah diterima selama mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Peneliti ingin mendapatkan informasi selama mengikuti pemberdayaan, manfaat, dan penerapannya.

Objek penelitian adalah keadaan sosial atau suatu masalah dalam penelitian. Tempat, pelaku, dan aktivitas disebut dengan objek penelitian. Objek penelitian ini adalah strategi pendamping PKH dalam mewujudkan kesetaraan gender.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, langkah strategis dalam penelitian. Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan yang berfungsi untuk mengungkapkan makna suatu peristiwa dalam konteks tertentu. Ini dilakukan dengan mengamati lokasi, sekelompok orang, atau beberapa organisasi.<sup>61</sup> Peneliti terjun ke lapangan untuk melihat bagaimana kegiatan, kebiasaan, dan perspektif mereka di tempat penelitian.<sup>62</sup> Peneliti melakukan sebagai pengamat. Peneliti melakukan observasi langsung terhadap kegiatan PKH yang dilakukan oleh pendamping PKH terhadap KPM yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Ini dilakukan agar peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang keadaan, mengumpulkan banyak informasi, dan menentukan tujuan penelitian.

Dalam praktiknya, peneliti telah melakukan observasi langsung terhadap interaksi antara penerima bantuan dengan pasangan di Desa Pacarejo Kecamatan Semanu Gunungkidul. Peneliti melakukan observasi menyeluruh selama beberapa waktu dan mengamati kegiatan P2K2 yang dilakukan secara bergiliran di salah satu rumah KPM yakni Ibu Y.

Peneliti memperoleh informasi dari sejumlah observasi yang dilakukan, yang terdiri dari gambaran, pola relasi gender antara suami dan istri pada penerima manfaat PKH. Selain itu, peneliti mengumpulkan informasi tentang kondisi yang terjadi di dalam rumah dan pekerjaan KPM di Kecamatan Semanu Gunungkidul serta mendapatkan data tentang rangkaian pelaksanaan P2K2

---

<sup>61</sup> Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian*, hlm. 114.

<sup>62</sup> John W Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode, Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 254.

yang berlangsung kurang lebih 1,5 jam. Peneliti melihat pendampingan yang dilakukan kepada KPM dalam mengedukasi mereka.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan metode tanya jawab untuk mendapatkan informasi. Beratatap muka secara langsung adalah metode wawancara yang memungkinkan peneliti untuk menilai kepastian dan keseriusan pertanyaan informan.<sup>63</sup> Dalam kasus tertentu, jika peneliti tidak dapat bertemu secara langsung dengan partisipan atau memberikan informasi tambahan, mereka melakukan wawancara melalui telepon.

Secara umum, informan yang diwawancarai terdiri dari pendamping PKH, KPM PKH, dan Koordinator Kabupaten Gunungkidul, yang merupakan subjek penelitian. Untuk mengembangkan jawaban dan mengetahui harapan, wawancara dilakukan dengan santai dan terbuka. Penelitian ini menggunakan wawancara secara mendalam. Wawancara dilakukan secara lebih terbuka meminta pendapat dari informan tetapi tidak melewatkan pertanyaan penting. Proses pencatatan dan pengolahan data dilakukan oleh peneliti.

Peneliti melakukan wawancara langsung sambil mengarahkan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Peneliti sebisa mungkin memandu jalannya wawancara agar tidak keluar dari bahasan. Selama

---

<sup>63</sup> John W Creswell, Research Design: *Pendekatan Metode, Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, hlm. 237.

wawancara berlangsung, peneliti menemukan bahwa jawaban yang sama dari setiap pendamping PKH memiliki arti yang berbeda.

Peneliti melakukan wawancara dan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan pendamping PKH mengenai pandangan mereka tentang kesetaraan gender, strategi mereka dalam menyampaikan FDS yang berkaitan dengan kesetaraan gender, dan tantangan yang dihadapi selama menjadi pendamping berkaitan dengan kesetaraan gender di Kecamatan Semanu. Peneliti menanyakan beberapa hal mengenai relasi gender kepada KPM, manfaat yang di dapat selama mengikuti FDS kaitanya dengan kesetaraan gender, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Wawancara ini dilakukan sejak periode 20 Desember 2023.

### c. Dokumentasi

Bukti yang sudah berlalu seperti tulisan, foto, gambar, atau karya seseorang disebut dokumentasi.<sup>64</sup> Data yang dikumpulkan melalui dokumen disebut metode pengumpulan data dengan dokumentasi. Buku Pertemuan Pengembangan Keluarga (FDS), juga dikenal sebagai Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), dan foto kegiatan yang dilakukan oleh pendamping PKH di Kecamatan Semanu adalah sumber informasi dalam penelitian ini.

---

<sup>64</sup> Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian*, hlm. 124-125.

## 5. Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dalam analisa data kualitatif yang dilakukan secara berulang sampai selesai. Proses analisa data termasuk pemilahan data (reduksi data), menyajikan data, dan membuat kesimpulan.<sup>65</sup>

Berikut ini adalah model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini:

### a. Reduksi Data

Setelah informan diwawancarai, peneliti memilah data yang tidak penting untuk menentukan jawaban atas masalah. Peneliti melakukan reduksi data sesuai dengan pelaksanaan program PKH yang dilaksanakan oleh pendamping PKH bersama KPM dalam mewujudkan kesetaraan gender di Kecamatan Semanu Gunungkidul.

### b. Penyajian Data

Peneliti menyajikan data disertakan dengan teks cerita untuk penjelasan awal pelaksanaan program PKH yang dilaksanakan oleh pendamping PKH bersama KPM dalam mewujudkan kesetaraan gender di Kecamatan Semanu Gunungkidul.

### c. Penarikan Kesimpulan

Peneliti menguraikan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah terkait strategi pendamping PKH dan pandangan KPM tentang kesetaraan gender.

---

<sup>65</sup> Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian*, hlm. 147.

#### d. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data membutuhkan teknik pemeriksaan dengan kriteria tertentu. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan sesuatu yang berbeda dari data untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan dengan data yang dikumpulkan melalui metode pengumpulan data. Informasi yang dikumpulkan diperiksa antara data wawancara dan data observasi serta dokumen.<sup>66</sup> Peneliti melakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Melakukan perbandingan antara apa yang dikatakan seseorang secara terbuka dan apa yang dikatakan secara pribadi. Hasil wawancara dengan pendamping PKH dilakukan pengecekan apakah valid atau tidak yang sudah disampaikan dengan melakukan wawancara juga kepada KPM.
- 2) Melakukan perbandingan antara materi *Family Development Session* dan materi yang disampaikan pada saat pertemuan P2K2 bab kesetaraan gender seperti pengasuhan anak dan pengelolaan keuangan.

#### G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan penelitian, pembahasan dibagi menjadi empat bab yakni:

Bab I : Bab yang menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Selanjutnya, peneliti menjelaskan lima penelitian sebelumnya yang membahas pendamping PKH dan gender dalam PKH. Kerangka teori menjelaskan gender dan gender dalam program keluarga

---

<sup>66</sup> Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian*, hlm. 166

harapan. Peneliti menguraikan metode penelitian kualitatif deskriptif. Tempat penelitian di Kecamatan Semanu, Gunungkidul, Yogyakarta. Sumber data utama adalah wawancara informan, dan sumber data tambahan adalah dokumentasi.

Penentuan subjek penelitian menggunakan *purposive sampling* yang terdiri dari pendamping PKH dan anggota KPM PKH. Objek penelitian mengacu pada kondisi kesetaraan gender yang dilakukan oleh pendamping PKH. Untuk mengumpulkan data dengan teknik observasi, wawancara *indepth interview*, dan dokumentasi telah digunakan dalam penelitian ini.

BAB II : Bab ini membahas tentang gambaran umum PKH nasional dan gambaran umum PKH di Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul.

BAB III : Bab ini menguraikan pembahasan terkait perspektif pendamping PKH terhadap gender, strategi pendamping PKH dalam mewujudkan gender dan tantangannya selama melakukan pendampingan.

BAB IV : Bab penutup mencakup kesimpulan dan saran. Kesimpulan berkaitan dengan jawaban atas rumusan masalah, dan saran merupakan rekomendasi dari peneliti untuk mendukung program PKH dalam meningkatkan kesetaraan gender.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai peran pendamping PKH dalam mewujudkan kesetaraan gender di Kecamatan Semanu Gunungkidul maka penelitian ini menyimpulkan bahwa:

1. Penelitian ini menunjukkan adanya keragaman pandangan atau perspektif di kalangan pendamping PKH tentang kesetaraan gender atau gender. Sebagian pendamping sudah memahami makna kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Beberapa pendamping menghendaki apabila materi gender ini menjadi modul *family development session* untuk menambah pengetahuan KPM.
2. Strategi yang diberikan pendamping PKH dalam mewujudkan kesetaraan gender kepada KPM menggunakan strategi *hidden curriculum* yang disamarkan kedalam modul FDS seperti modul pengasuhan dan pendidikan anak, modul pengelolaan ekonomi dan perencanaan usaha, modul kesehatan dan gizi, dan modul perlindungan anak. Poin-poin yang disampaikan pendamping yaitu penekanan tentang pembagian peran orang tua, berbagi pengalaman, memotivasi, pelatihan, mekanisme pemantauan menggunakan tabel janji diri, dan pemberian contoh kasus.
3. Tantangan yang dihadapi pendamping PKH dalam mewujudkan kesetaraan gender berasal dari faktor pendamping dan masyarakat. Tantangan ini meliputi tidak adanya peningkatan kapasitas materi khusus gender yang

diperoleh pendamping, faktor internal status pendamping yang belum menikah sehingga merasa kurang kompeten dalam menyampaikan pembagian peran orang tua, dan faktor dari masyarakat umum yang masih menganut budaya patriarki kuat. Tantangan yang paling sulit dihadapi oleh pendamping yaitu adanya masyarakat yang masih berpaham patriarki sehingga sulit menerima materi dari pendamping untuk diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Sebagian penerima manfaat masih sangat tunduk dengan adanya struktur masyarakat sehingga sulit untuk diubah.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti yang didasarkan pada hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

### **1. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian tentang gender dan PKH dapat lebih memfokuskan pada persepsi KPM daripada pendamping. Peneliti selanjutnya juga dapat menganalisa sejauh mana *Family Development Session* mengubah pola perilaku KPM khususnya tentang kesetaraan gender. Untuk memastikan kesetaraan gender yang dilakukan oleh pendamping peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang berfokus pada kategori gender pada pendamping sendiri.

### **2. Bagi Praktis Pekerjaan Sosial**

Berdasarkan pada hasil penelitian terkait dengan peran pendamping PKH dalam mewujudkan kesetaraan gender, peneliti menyarankan bahwa

pekerja sosial harus memiliki pemahaman tentang gender dan perlu adanya peningkatan pelatihan atau pendidikan yang berkaitan dengan gender, sehingga ketika turun ke lapangan pekerja sosial atau pendamping sebagai penentu keberhasilan dapat memaksimalkan edukasinya kepada masyarakat.

### 3. Bagi Kebijakan Sosial

Guna mendukung keberhasilan program keluarga harapan maka perlu mengimplisitkan diskusi tentang gender di dalam modul *Family Development Session*. Kebijakan ini dapat mendukung program lain untuk memperjelas dan mengupayakan kesetaraan gender di masyarakat. Pemangku kebijakan dapat membekali dan menyediakan secara khusus modul gender sebagai bahan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).

## DAFTAR PUSTAKA

- Adearti, W, *Pengaruh Family Development Session (FDS) oleh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Pola Asuh Orang Tua di Kecamatan Lakbok*, Skripsi, Bandung: Jurusan Psikologi Fakultas Psikologi, UIN Sunan Gunung Djati, 2022.
- Arfiyani, I., Raharjo, T. J., & Yusuf, A., “Family Development Session sebagai upaya peningkatan keterampilan hidup masyarakat miskin”, *Ilmu Sosial Dan Humaniora*, vol. 9:1, 2020.
- Azisah, S., & Kara, S. A., *Buku Saku: Konstektualisasi Gender Islam dan Budaya*. Makasar: Seri Kemitraan Universitas Masyarakat (KUM) UIN Alauddin, 2016.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gunungkidul, “Indikator Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul 2021-2023”, BPS Gunungkidul.
- Berita Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemkot Yogya Beri Penguatan Pendamping PKH, <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/26041>, 2023.
- Chotim, E. E., & Al Jannah, N. A., “Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Praktis Dan Strategis Gender Dalam Perspektif Moser”, *Ilmiah MEA*, vol. 5:1, 2021.
- Clara A. & Feni R. “Peran Ganda Perempuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus di Pabrik Karet CV KA 2 Desa Negeri Ulangan Jaya Kab Pesawaran)”, *Ilmu Kesejahteraan Sosial*, vol, 10: 3, 2023.
- Creswell, J. W., *Research design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Dinas Sosial PPPA, Kabupaten Gunungkidul.
- Dini, I. Muzayyanah, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020.
- Dukcapil Gunungkidul, “Jumlah Kepala Keluarga Di Kabupaten Gunungkidul”, <https://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/2020/04/07/jumlah-kepala-keluarga-di-kabupaten-gunungkidul/>, 2020.
- Esariti, Landung, “Pengarutamaan Gender dalam Program Gerbang Hebat Sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan di Kota Semarang”, *Tata Loka*, vol. 21:1, 2019.

- Hanif, H., Fatimah, D., & Zubaedah, *Mewujudkan Program Keluarga Harapan (PKH) yang lebih bermakna*, Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung, Kantor Perwakilan Indonesia, 2015.
- Hasan, A. M., Siscawati, M., & Kusniati, S., “Feminisasi Kemiskinan: Akses dan Kontrol Perempuan pada Program Keluarga Harapan di Masa Covid-19”, *Ilmu Agama Dan Kebudayaan*, vol. 23:1, 2023.
- Huda, Jumatil, *Peran Wanita dalam Ranah Domestik dan Publik dalam Pandangan Islam*, Tesis, Yogyakarta: Jurusan Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2015.
- Jalal, Abdul, *Implementasi Family Development Session Program Keluarga Harapan di PKH Kecamatan Tugu Kota Semarang (Analisis Bimbingan Konseling Keluarga Islami)*, Skripsi, Semarang: Jurusan BPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo, 2019.
- Kemensos RI Raih Penghargaan APE 2020 Kategori Madya dari Kemen PPPA, <https://kemensos.go.id/berhasil-implementasikan-kesetaraan-gender-kemensos-ri-raih-penghargaan-ape-2020-kategori-madya-dari-kemen-pppa>, 2020.
- Kementerian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun*, Jakarta: Direktorat Jaminan Sosial Keluarga dan Direktorat Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial, 2021.
- Kementerian Keuangan RI, *Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah Jalan Menuju Kesetaraan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2022.
- Larasati, B., & Jannah, L. M., “Transfer Kebijakan dan Implementasi Program Bantuan Tunai Bersyarat (Conditional Cash Transfer/CCT) di Indonesia”, *Administrasi Publik*, vol. 81, 2022.
- Nadilla, H. F., Nurwati, N., & Santoso, M. B., “Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Penanggulangan Anak Stunting Pada Keluarga Penerima Manfaat”, *Focus Pekerjaan Sosial*, vol. 5:1, 2022.
- Nainggolan, T., “Aspek Gender dalam Program Keluarga Harapan”, *Sosio Informa*, vol. 5:1, 2019.
- Novirensi, I., “Perempuan Dalam “Misi Suci” Kesejahteraan Sosial: Wujud Dikotomi” *Kajian Islam Interdisipliner*, vol. 3:1, 2018.
- Nur, M & Refti Handini, “Pembangunan Berbasis Gender Mainstreaming”, *Paradigma*, vol. 5:3 2017.

Observasi kehidupan pasangan KPM Kecamatan Semanu, Kecamatan Semanu, 20 Oktober 2023.

Open Data, Pengarusutamaan Gender, [https://issuu.com/opendatabdg/docs/profil\\_gender\\_dan\\_anak\\_kota\\_bandung\\_2021/s/17746269](https://issuu.com/opendatabdg/docs/profil_gender_dan_anak_kota_bandung_2021/s/17746269), diakses pada 31 Mei 2024.

Parker, Andrew, “Regulasi dan Efek Tetesan ke Bawah (*trickle-down effect*) Perempuan dalam Peran Kepemimpinan”, *Elsevier*, 2023.

PKH Kabupaten Gunungkidul, “Pelaksanaan PKH Kab. Gunungkidul”, PKH Gunungkidul.

PKH Poso, Tupoksi Pendamping Sosial, <https://blogpkhposo.wordpress.com/sdm-pkh/tupoksi-pendamping-sosial>, diakses pada 31 Mei 2024.

Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial RI, Modul Pengasuhan dan Pendidikan Anak.

Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial RI, Modul Pengelolaan Keuangan dan Perencanaan Usaha.

Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial RI, Modul Kesehatan dan Gizi.

Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial RI, Modul Perlindungan Anak.

Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial RI, Modul Kesejahteraan Sosial.

Ramadhani, A. D., & Yuliani, S., “Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Keluarga Harapan di Kabupaten Klaten (Studi Gender Model Sara Hlupekile Longwe)”, *Mahasiswa Wacana Publik*, vol. 2:2, 2022.

Sadya, Sarnita, DataIndonesia: WEF: Kesetaraan Gender Indonesia Membaik, <https://kemensos.go.id/berhasil-implementasikan-kesetaraan-gender-kemensos-ri-raih-penghargaan-ape-2020-kategori-madya-dari-kemen-pppa>, 2022.

Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Citapustaka Media, 2012.

Saragih, D., “Perempuan dalam Pengelolaan Bantuan Program Keluarga Harapan: Perspektif Sosiologi Gender”, *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, vol. 8:3, 2022.

Sari, Silvia A, *Proses Pemberdayaan Melalui Family Development Session (FDS) Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Graduasi Mandiri di Kepanewon Banguntapan Kabupaten Bantul*, Skripsi,

Yogyakarta: Jurusan IKS Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2023.

Sasongko, S. S., *Konsep dan Teori gender*. Jakarta: BKkbN, 2009.

Sujarwo, S., & Wibawa, L., “Analisis Permasalahan Perempuan Dan Potensi Lokal Di Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta” *Penelitian Humaniora*, vol. 18:2, 2017.

Susantyo, B. & Togiaratua N., “Integrasi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan”, *Quantum*, vol. 15:26, 2018.

Trisnawati, W, *Family Development Session (FDS) di Desa Sidaurip Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap*, Tesis, Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, UNY, 2020.

Wahyu, Catarina, *Data Pilah Gender dan Anak Kabupaten Gunungkidul 2023*, Gunungkidul: Dinas Sosial PPPA, 2023.

Wawancara dengan Agung, Pendamping PKH Kecamatan Semanu, 1 April 2024.

Wawancara dengan AA, Pendamping PKH Kecamatan Semanu, 21 Desember 2023.

Wawancara dengan AS, Pendamping PKH Kecamatan Semanu, 21 Desember 2023.

Wawancara dengan D, Pendamping PKH Kecamatan Semanu, 21 Desember 2023.

Wawancara dengan DP, Pendamping PKH Kecamatan Semanu, 31 Mei 2024.

Wawancara dengan H, Koordinator PKH Kabupaten Gunungkidul, 25 Maret 2024.

Wawancara dengan M, Pendamping PKH Kecamatan Semanu, 21 Desember 2023.

Wawancara dengan J, KPM PKH Kecamatan Semanu. 31 April 2024.

Wawancara dengan S, Pendamping PKH Kecamatan Semanu, 21 Desember 2023.

Wawancara dengan T, Keluarga Penerima Manfaat Kecamatan Semanu, 20 April 2024.

Wawancara dengan W, KPM PKH Kecamatan Semanu. 31 April 2024.

Wawancara dengan Y, Keluarga Penerima Manfaat Kecamatan Semanu, 20 April 2024.

Yatminiwati, Mimin, *Managemen Strategi*, Jawa Timur: Widya Gama Press, 2019.

